

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN DESA WISATA PANDANREJO
KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

Rizki Hardianto

NPP. 29.0845

*Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: ardi.hardianto27@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Tourism is one of the leading sectors in Indonesia. Tourism village development is a government step in increasing regional tourism potential, in this case especially the Purworejo Regency area which has a diversity of tourist village objects that can be developed to increase people's income. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze the role of the Youth, Sports and Tourism Office in the development of tourist villages, especially the Pandanrejo Tourism Village, what are the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts made by the Youth, Sports and Tourism Office in overcoming the inhibiting factors in the development of tourist villages. **Method:** The research method used by the author in the preparation of this thesis is qualitative with an inductive approach and data collection techniques using documentation, interviews and observations. The analytical technique used in the preparation of this thesis is triangulation data analysis. **Result:** Based on the results of the study, the implementation of the development policy of the Pandanrejo Tourism Village was considered good but not optimal. **Conclusion:** With the non-optimality it is concluded that there are several obstacles such as the level of technological understanding, investor involvement and the Covid 19 pandemic, in addition to the commitment from the government, the Borobudur Authority Agency (BOB) and the National Strategic Project of the Borobudur Authority Agency as a supporter of development. So that suggestions are addressed to the Youth, Sports and Tourism Office of Purworejo Regency in order to improve the development of the Pandanrejo Tourism Village to be more effective, such as maximizing socialization activities and infrastructure development and exposing existing tourism in Pandanrejo Village in order to attract investors or third parties in the development of tourist villages.

Keywords: implementation, policy, development, tourism village

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Indonesia. Pengembangan Desa Wisata merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan potensi wisata daerah, dalam hal ini khususnya wilayah Kabupaten Purworejo yang memiliki keanekaragaman objek desa wisata dapat dikembangkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan desa wisata khususnya Desa Wisata Pandanrejo, apa saja faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis triangulasi data. **Hasil/temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo dirasa baik namun belum optimal. **Kesimpulan:** Dengan ketidak optimalan tersebut disimpulkan bahwa adanya beberapa kendala seperti tingkat kepehaman teknologi para aperatur, keterlibatan investor dan adanya pandemi *Covid 19*, disamping itu adanya komitmen dari pemerintah, Badan Otoritas Borobudur (BOB) serta adanya proyek Strategis Nasional Badan Otoritas Borobudur sebagai pendukung pengembangan. Sehingga saran yang ditujukan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo agar dapat meningkatkan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo agar lebih efektif seperti memaksimalkan kegiatan sosialisasi serta pembangunan infrasturkut dan mengekspos wisata yang ada di Desa Pandanrejo supaya menggait investor atau pihak ketiga dalam pengembangan desa wisata. **Kata kunci:** implementasi, kebijakan, pengembangan, desa wisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata masuk pada sektor unggulan di Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam memajukan pariwisata, pembangunan sektor pariwisata selalu ditingkatkan secara berkelanjutan dengan pengembangan sumber dan potensi pariwisata yang telah ada serta terus menggali potensi-potensi wisata baru. Salah satu potensi wisata ialah desa wisata. Pengembangan desa wisata merupakan upaya pemerintah di dalam meningkatkan potensi wisata daerah, hal tersebut membuat tiap-tiap daerah mengembangkan identitas dan ciri khas yang dimilikinya masing-masing selaras dengan semangat otonomi daerah yang memberi peluang terhadap pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri kebutuhan daerahnya sesuai prakarsa masyarakat setempat berdasarkan asas demokrasi, peran dari penduduk atau masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan juga memperhatikan potensi keberagaman daerah setempat. Jawa Tengah masuk dalam salah satu dari 34 provinsi yang berada di Indonesia yang memiliki pesona untuk wisatawan baik wisatawan lokal

maupun mancanegara. Sektor pariwisata di provinsi ini menjadi primadona untuk menarik wisatawan karena daya tarik yang dimilikinya, adapun wisata yang populer disana seperti Candi Borobudur, Karimun Jawa, Keraton Surakarta, Museum Manusia Purba Sangiran, Lawang Sewu dan masih banyak yang lainnya.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi wisata alam dan wisata budaya yang unik dan menarik untuk dijadikan objek pariwisata di provinsi Jawa Tengah. Keragaman objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo merupakan potensi yang dapat dikembangkan melalui perencanaan dan pengelolaan terpadu. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Purworejo memiliki banyak kekayaan alam dan warisan budaya sejarah yang dimilikinya. Curug Muncar, *The Loano Glamping*, Pantai Dewa Ruci, dan Hutan Pinus Kalilo adalah sebagian wisata yang terdapat di Kabupaten Purworejo yang bernuansa alam. Kabupaten Purworejo terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan sebesar 67 % di tahun 2020 dibandingkan kunjungan wisata di tahun 2019 menjadi kunjungan terbanyak dalam rentang tahun tersebut, berlanjut di tahun 2021 kembali turun, salah satu faktor penurunan ini ialah pandemi yang sedang melanda. Meski begitu perlu adanya upaya untuk pengembangan wisata. Salah satu potensi wilayah yang ada ialah desa wisata terutama di Desa Pandanrejo yang dapat menjadi desa berpotensi untuk diola. Keadaan Desa Pandanrejo yang berada di kawasan deretan Perbukitan Menoreh dengan jarak 17 km dari pusat Kota Purworejo dan 36 km dari pusat Kota Yogyakarta sudah sangat menunjang dalam pembentukan sebagai objek desa wisata bagi wisatawan karena potensi wisata yang menarik dari segi ekonomi, social budaya, dan alam.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang menjadi permasalahan desa wisata tersebut, misalnya ialah sumber daya masyarakat lokal disana yang masih belum konsisten dalam menjaga objek wisata sehingga menghambat perkembangan potensi yang dimiliki. Program pariwisata harus memiliki dukungan aktif dari tiga aktornya yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Masih minimnya cinderamata khas untuk dibawa pulang para wisatawan seperti souvenir, kaos, gelang, topi, batik dan kerajinan lainnya yang dapat dibawa sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Selanjutnya, masih minimnya fasilitas penunjang serta fasilitas amenities (akomodasi, tempat istirahat) guna mendukung pengembangan desa wisata sehingga peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) sangat dibutuhkan didalam peningkatan pengembangan desa wisata. Apabila tidak ada usaha yang dilakukan dan perubahan secara berkala maka aset daerah serta daya tarik wisatawan akan semakin menurun sehingga perlu adanya tindak lanjut didalam perkembangan desa wisata tersebut, apalagi masih banyak di desa tersebut potensi yang ada diantaranya Gunung Gajah, Bukit Sebutrong, Kampung Cantik, dan Pasar Seton. Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Purworejo khususnya Desa Pandanrejo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata. Dalam pasal 14 dijelaskan tentang pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata berupa usaha daya tarik

wisata, usaha informasi wisata, usaha atraksi wisata, usaha akomodasi wisata dan kuliner, usaha kerajinan rakyat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi maupun dalam pengembangan Desa Wisata. Penelitian pertama oleh T. Prasetyo Hadi Atmoko (2018), melakukan penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman*. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian dengan menerapkan analisis SWOT di dapat hasil bahwa Desa Sendangmulyo dengan sarana yang memadai memiliki kekuatan potensi budaya dengan dukungan dari masyarakat yang menjadikan peluang sebagai destinasi budaya. Meski demikian ada kelemahan dalam hal SDM yang kurang terampil serta kurang memahami fungsi dari kelembagaan yang dapat mengancam kurangnya pemahan budaya serta keterlibatan generasi muda. Penelitian kedua Reny triwardani dan Christina Rochayanti (2014), melakukan penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal*. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian dalam implementasinya memiliki tiga aspek prioritas pengembangan yaitu SDM, kelembagaan, dan prasarana dengan harapan dapat memunculkan destinasi wisata baru. Neshafi Laudza Rahmadian (2021), melakukan penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Pada Pengembangan Desa Wisata Tlahab*. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menyebutkan implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung diterapkan secara eksplisit, yakni tegas dalam pelaksanaan dan transparan dalam pelayanan sehingga Desa Wisata Tlahab mengalami perkembangan dalam administrasi maupun operasional. Soleman Yelo Bora (2018), melakukan penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian melalui pendekatan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya saling keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat Desa Sidomulyo, serta birokrasi yang sudah seutuhnya mendukung pengembangan wisata bunga di Desa Sidomulyo meski begitu perlu adanya pengembangan kelengkapan saran dan prasarana bagi petani guna mendukung kegiatan pariwisata. Sri Nurhayati Qodriyatun (2018), melakukan penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa*. Adapun lokasi penelitian adalah kawasan Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menyebutkan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Karimunjawa berdampak pada permasalahan sampah, air bersih, kerusakan terumbu karang, dan perubahan sosial budaya masyarakat, meski begitu ada efek positif yaitu membuka lapangan kerja baru dan peningkatan pendapat bagi masyarakat setempat. Desak Putu Dewi Ryani dan Gede Sandisa (2017),

melakukan penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Air Sanih*. Adapun lokasi penelitian adalah kawasan wisata Air Sanih Desa Pakraman Sanih Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menyebutkan implementasi kebijakan Desa Pakraman dalam pengelolaan pariwisata di objek wisata Air Sanih melibatkan warga setempat dalam pengelolaan objek wisata sehingga memberikan dampak positif baik dari ekonomi serta sosial budaya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat Edward III mengenai teori implementasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Pandanrejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Pandanrejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Pandanrejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini sumber data bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata, Camat Kaligesing, Kepala Desa Pandanrejo, Tokoh Masyarakat Desa Pandanrejo, Wisatawan pengunjung desa wisata, serta Pelaku Usaha di Kawasan Desa wisata. Informan pada penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara tidak terstruktur, observasi nonpartisipasi, serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Edward III mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Simangunsong yakni, pengolahan data, penganalisisan data, dan penafsiran hasil analisis serta oleh Moleong dengan 4 jenis triangulasi yakni sumber, metode, peneliti dan teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan pendapat Edward III mengenai teori implementasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Komunikasi

Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan desa wisata pada bagian komunikasi harus mengandung prinsip-prinsip yang menunjang keberhasilan komunikasi seperti transmisi, kejelasan dan konsistensi. Beberapa bentuk pelaksanaan pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo ialah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata antara lain:

a. Transmisi

Transmisi pada dasarnya bertujuan agar kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan baik langsung maupun tidak langsung. Pelaksana kebijakan wajib mengetahui tentang keberadaan dan berlakunya suatu kebijakan sebelum diinformasikan kepada sasaran kebijakan. Pertama kali dilakukan adalah menginformasikan peraturan itu dengan jelas kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam peraturan tersebut. Kebijakan Pengembangan Desa Wisata dibagi menjadi 2 yaitu berbasis kepada masyarakat dalam pengelolaan wisata dan adanya kemanfaatan wisata yang terdapat di Kabupaten Purworejo baik untuk pengelola serta masyarakat sekitar dan pengunjung yang datang. Sebagai Dinas yang memiliki sangkutan dengan wisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memberikan pendukung pengembangan berupa pelatihan. Menyangkut penyaluran atau penyampaian informasi diantara sesama implementator perlunya keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang dikeluarkan. Transmisi kebijakan desa wisata melalui 2 cara yaitu dengan dibuatkan surat keputusan forum komunikasi untuk desa wisata sehingga kejelasan mudah dipahami oleh desa yang mendapat Surat Keputusan (SK) tersebut dan Sumber Daya Manusia atau warga masyarakat di desa wisata yang aktif dalam pengembangan potensi desa dengan dibentuk Kelompok Sadar Wisata atau istilah lainnya Pokdarwis di desa wisata. Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah menjalankan transmisi agar sasaran dijalankannya dalam pengembangan desa wisata dapat berjalan selaras dengan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Desa Pandanrejo sendiri telah mendapatkan identitas sebagai desa wisata pada 2020 dan menjadi rujukan karena pengembangan desa yang terdapat di kecamatan Kaligesing ini sangatlah pesat pada saat pandemi dalam pengembangan potensinya.

b. Kejelasan

Kejelasan mengenai petunjuk teknis penetapan desa menjadi desa wisata sangat diperlukan karena desa menjadi diakui karena keberadaan wisata yang menjadi nilai jual kepada pengunjung karena desa

wisata sendiri perlu dikembangkan karena potensi desa sendiri beraneka ragam sehingga baik alam, budaya ataupun kuliner menjadi nilai jual kepada pengunjung. Petunjuk teknis yang disampaikan kepada warga khususnya POKDARWIS dan adanya kejelasan penetapan desa wisata dengan adanya Perda Nomor 15 tahun 2019 tentang desa wisata namun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui gelar desa wisata. Padahal DINPORAPAR telah melakukan sosialisasi mengenai penetapan Desa menjadi desa wisata sehingga tidak semua pihak paham dan mengenai penetapan desa wisata di desa wisata tersebut oleh karena itu masyarakat haruslah didorong ikut berperan aktif khususnya di desa sendiri karena masyarakat disana sendiri yang mayoritas peternak menilai desa ini sendiri merupakan sentra kambing etawa, sehingga bila masyarakat desa ditanya mengenai aturan tentang penetapan desa wisata pasti tahu bahwa desa punya potensi wisata akan tetapi dasar dari desa wisata juga harus disosialisasikan untuk menambah pemahaman masyarakat desa sendiri.

c. Konsistensi

Kepastian dan kejelasan perintah dilaksanakan oleh para pelaksana memiliki arti bahwa perintah yang diterima tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga tidak membingungkan pelaksana. Selain itu kejelasan perintah Kepala Dinas dalam penetapan desa menjadi desa wisata. Adanya Perda Nomor 15 tahun 2019 tentang desa wisata sehingga penetapan Desa menjadi Desa Wisata langsung di proses oleh Dinas terkait dan dari seluruh desa di Kabupaten Purworejo yang memiliki potensi wisata dan nilai jual yang dimilikinya oleh karenanya Bupati beserta DPRD yang semangat mendukung kemajuan pariwisata haruslah menjadi cambuk bagi saya selaku kepala dinas untuk mengembangkan dan membangun pariwisata di Purworejo yang berdaya saing dan memiliki nilai jual serta kegunaan buat masyarakat sekitar. Berbicara mengenai konsistensi, sesuai program Bupati yaitu Romansa Purworejo bahwa wisata di Kabupaten Purworejo harus didukung seluruh lapisan karena DPRD bersama Bupati telah sepakat dalam pengembangan wisata khususnya desa wisata di Purworejo haruslah mensejahterakan masyarakat bukan malah berdampak buruk seperti kerusakan lingkungan saja oleh sebab itu Dinas terkait harus selalu mengembangkati potensi-potensi desa guna menjadi desa wisata yang memiliki keunikan dan nilai jual yang dipunyai desa wisata. Dapat disimpulkan bentuk konsistensi perintah sudah jelas dan dipahami seluruh elemen baik dari Dinas terkait, Kecamatan, serta sampai dengan Desa yang bersangkutan apalagi Perda Nomor 15 tahun 2019 tentang desa wisata

3.2. Sumber Daya

Dalam pengembangan desa wisata diperlukan adanya sumber daya karena tanpa adanya sumber daya tersebut pengembangan Desa wisata tidak akan berjalan dengan baik, karena sumber daya sebagai obyek yang sangat sentral dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata haruslah menjadi tonggak pendorong kemajuan pariwisata.

a. Staf

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memiliki aparatur/ staf berupa pegawai yang sifatnya melaksanakan tugas administratif di kantor DINPORAPAR Kabupaten Purworejo. DINPORARAPAR tentunya tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan pengembangan

desa wisata di Kabupaten Purworejo namun adanya Tim dari Kabupaten serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga dalam melaksanakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo aparatur-aparatur yang ada telah ahli dan paham mengenai tugas masing-masing sehingga desa wisata harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat bekerjasama dengan baik untuk kemajuan pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo. Untuk kompetensi aparatur di dinas sendiri dirasa cukup apalagi tingkat Pendidikan para pegawai di Dinas ini sendiri sangatlah beragam mungkin untuk kedepannya perlu penambahan sedikit untuk mempercepat perkembangan sehingga semuanya selalu bekerjasama dengan baik satu sama lain sehingga perlunya teknologi yang semakin hari semakin berkembang harus juga di sediakan oleh pemerintah karena tidak hanya aparatur yang baik dan cukup, teknologi harus juga di dukung guna kemajuan pelaksanaan pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo.

b. Informasi

Mengenai Informasi pengembangan desa wisata khususnya Desa Pandanrejo telah disebarluaskan melalui media massa serta media sosial yang dilakukan secara berkala, Talk show di Radio dan yang terbaru *podcast* cangkir kopi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan promosi di media massa. Namun hal tersebut belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wisata tersebut apalagi ditambah dengan pandemi Covid-19. Informasi pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo masih belum optimal terbukti dari masyarakat yang masih ada belum paham mengenai informasi pengembangan Desa Wisata Pandanrejo sehingga peran serta masyarakat dalam keterlibatan dalam implementasi kebijakan desa wisata belum sesuai harapan karena keterlibatan masyarakat masih minim adapaun harapannya ialah semua pihak dalam pengembangan desa wisata punya kejelasan informasi supaya masyarakat di dapat memahami dan ikut serta dalam segala bentuk kegiatan pengembangan desa wisata

c. Wewenang

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Pandanrejo di Kabupaten Purworejo, DINPORAPAR harus selalu berhubungan langsung dengan kepala wilayah terutama desa wisata dan kecamatan yang ditempati desa tersebut sehingga Desa Pandanrejo sebagai desa wisata yang punya potensi luar biasa haruslah menjadi perhatian karena Desa Pandanrejo pada khususnya dan Kecamatan Kaligesing pada umumnya diharapkan mampu bwekembang sebagai potensi wisata di Kabupaten Purworejo. Seluruh kewenangan mutlak diberikan kepada desa karena desa wisata haruslah mandiri atau dapat berjalan sendiri sehingga seluruh pengelolaan dari desa sendiri dan kewenangan muncul dari desa sehingga DINPORAPAR hanya mendorong dengan memfasilitasi, pelatihan dan pembinaan kepada desa wisata karena bila terdapat permasalahan kewenangan dari desalah yang harus cepat meredam dan mengatasi masalah yang muncul bila masih belum bisa di atasi dinas akan turun tangan memfasilitasi dan membantu desa untuk mengatasi permasalahan karena dinas percaya kepada desa-desa wisata di Kabupaten Purworejo khususnya Desa Pandanrejo untuk dapat berkembang. Selain itu dalam hal wewenang pengelolaan langsung turun karang taruna bersama masyarakat untuk turun ke lapangan. Untuk mendukungnya pula Camat sendiri

berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk perbaikan sarana prasarana fasilitas guna mendukung pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo terkhusus di Kecamatan Kaligesing dimana Desa Pandanrejo sebagai destinasi favorit wisata.

d. Fasilitas

Fasilitas dan sarana prasarana dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaannya Fasilitas meliputi sarana dan prasarana pendukung desa wisata harus selalu dipantau dan dibenahi adalah akses menuju selalu bagus tentunya mempermudah perjalanan dan dapat meningkatkan kunjungan dan dikirimkan lomba & event di tingkat provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dinas karena desa wisata telah dianggap mampu dan bisa bersaing contohnya ialah Desa Wisata Pandanrejo di Kecamatan Kaligesing dengan Kambing PE dan jamu tradisional kulit manggis serta ikon kopinya. Fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah daerah dinilai telah memuaskan dapat dilihat warga dan tokoh masyarakat yang melihat perkembangan wisata dinilai baik oleh karenanya kedepan masyarakat di desa harus didorong untuk ikut menjaga fasilitas yang diberikan seperti PJU, Jalan yang kini bagus dikawasan desa wisata, Tempat duduk untuk pengunjung atau gazebo di kawasan wisata dan sebagainya harus dirawat dan dijaga dengan baik maka akan cepat rusak dan mengurangi nilai estetika pariwisata khususnya di desa wisata

3.3. Disposisi

Dalam proses keberhasilan Implementasi Pengembangan Desa Wisata Pandanrejo adanya disposisi yaitu sikap, komitmen dari para pelaksana, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana program dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.

a. Pengangkatan birokrat

Untuk menganalisis bagaimana pengangkatan birokrat penulis melakukan wawancara dengan stakeholder yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo karena dinas ini yang tahu mengenai pengangkatan birokrat sebagai pelaksana (tim penilai) pengembangan desa menjadi desa wisata. Dalam pelaksanaannya pengangkatan birokrat pelaksana pengembangan desa wisata diberikan kepada desa dan BUMDes dan POKDARWIS yang lebih berwenang karena dinas sendiri Bersama Tim dari Kabupaten serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memantau dan memfasilitasi guna mempercepat pengembangan pada desa wisata di Kabupaten Purworejo karena perintah dari Bupati Purworejo bahwa Infrastruktur di tempat-tepat wisata haruslah mendukung program Romansa Purworejo dan dapat berjalan karena semua demi citra pariwisata di Kabupaten Purworejo.

b. Insentif

Adapun pemberian insentif khusus guna meningkatkan kinerja yang diberikan kepada pelaksana pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo menjadi salah satu analisis penelitian dalam upaya dalam pelaksana pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo. DINPORAPAR Kabupaten Purworejo tidak memiliki perencanaan anggaran khusus untuk pemberian insentif kepada aparatur yang ada dalam pelaksana pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo. Dalam hal

ini yang mendapat insentif masyarakat yang ikut mengembangkan desa wisata karena pemerintah memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri, dan keuntungan untuk masyarakat yang berkerja ataupun berwirausaha di Kawasan pariwisata sendiri.

3.4. Struktur Birokrasi

Bentuk dan susunan organisasi menjadi salah satu penunjang akan efektifnya kegiatan pemerintahan. Selain memiliki pengaruh yang strategis struktur birokrasi memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup baik, maka DINPORAPAR dalam mengurus pengembangan desa wisata khususnya di desa Pandanrejo adalah bidang pemasaran, sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif.

a. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur terkait penetapan desa wisata diatur pada peraturan daerah Kabupaten Purworejo nomor 15 tahun 2019 tentang desa wisata pasal 6 meliputi:

1. Pencanaan desa wisata yaitu pengajuan permohonan sesuai dengan peraturan dapat dilakukan oleh masyarakat, badan usaha milik desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa kepada Bupati dan akan diteruskan kepada Gubernur.
2. Penilaian desa wisata dalam hal ini Bupati memerintahkan perangkat daerah teknis atau dinas pariwisata untuk melakukan penilaian meliputi aspek sebagai berikut; atraksi wisata, kondisi geografis, sistem kepercayaan, ketersediaan infrastruktur, perkembangan pengunjung, rencana kelembagaan, analisis tata ruang, dan analisis mitigasi bencana.
3. Penetapan desa wisata dalam hal ini bupati menetapkan sebuah desa menjadi desa wisata setelah dilakukan penilaian dan memperhatikan hasil penilaian, kemudian Bupati akan menetapkan desa menjadi desa wisata dengan Keputusan Bupati.

Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dalam hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan penyelenggaraan Desa Wisata. Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam, menjamin pelestarian nilai-nilai budaya local, dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Fragmentasi

Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Pihak ketiga dalam percepatan pembagunan dan pengembangan fasilitas, sarana dan prasaran pada wisata membuat wisata lebih menarik dan punya ciri khas sendiri oleh karenanya investor dalam pembangunan pariwisata sangat dibutuhkan untuk menunjang kunjungan wisata khususnya di desa-desa wisata yang terdapat di Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pihak lain yang ikut menangani pengembangan desa wisata Pandanrejo di Kecamatan Kaligesing diluar Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan aktif untuk menangani pengembangan desa wisata kemarin dari pihak Bank Jateng memberikan bantuan berupa sarana MCK di Desa Sukowuwuh dan kelompok

GELANGPROJO yang mengeksplor Desa Pandanrejo dengan minimnya investor sehingga masih perlunya investor untuk mendorong percepatan di Kawasan desa sendiri karena potensi di desa wisata telah ada dan dinilai mumpuni

3.5. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yaitu:

1. Dukungan dari pihak pemerintah mulai dari Bupati dan DPRD ditambah Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti DINPORAPAR sehingga pengembangan desa wisata
2. Desa Wisata Pandanrejo mempunyai dukungan keunggulan mulai dari masuk dalam pengembangan BOB, serta adanya proyek strategis nasional Benduangs Bener.
3. Kesadaran masyarakat terkait potensi wisata desa.

3.6. Faktor Penghambat

Diketahui bahwa mengenai penghambat yang berasal dari intenal adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepaahaman teknologi menjadi faktor penghambat;
2. Jumlah investor dalam menanamkan modal;
3. Pandemi covid 19 menghambat pengembangan desa wisata

3.7. Upaya Yang Dilakukan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi E-Kinerja Melalui Pengawasan dan Pembinaan Pegawai Masa Pandemi Covid-19 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang

Diketahui bahwa yang menjadi upaya yang dilakukan yaitu:

1. Upaya yang dilakukan yaitu perbaikan birokrasi terkait penguasaan keahlian IT dengan melakukan pembekalan dan pelatihan;
2. Mengembangkan potensi dan promosi desa wisata agar menarik para investor;
3. Berkoordinasi dengan pihak desa;
4. Perbaikan fasilitas seperti akses jalan, sarana MCK, serta fasilitas pendukung lainnya;
5. Merencanakan kegiatan festival budaya untuk menarik pengunjung.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Desa wisata merupakan salah satu daya tarik untuk memperkenalkan pariwisata serta berbagai hak yang terdapat didalamnya. Desa Wisata Pandan Rejo merupakan salah sat desa wisata yang terdapat di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Desa Wisata Pandanrejo merupakan wisata perbukitan yang dapat menjadi daya tarik seperti kebudayaannya, sosial serta terlebih utama yakni pariwisata yang dapat dikembangkan serta dikelola secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Desa Pandanreji dibuat kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata. Peraturan daerah ini sendiri sebenarnya tidak hanya mengatur

mengenai desa wisata di Pandanrejo tetapi keseluruhan yang terletak di Kabupaten Purworejo. Pada pelaksanaannya implementasi kebijakan ini sudah berjalan baik seperti halnya dalam penelitian T. Prasetyo Hadi Atmoko (2018) yang mana setelah dianalisis dengan SWOT Desa Sendangmulyo dengan sarana yang memadai memiliki kekuatan potensi budaya dengan dukungan dari masyarakat yang menjadikan peluang sebagai destinasi budaya seperti hanya tiap-tiap desa wisata memiliki daya tarik utama tersendiri untuk menarik wisatawan agar dapat berkunjung ke desa wisata ini. selain itu terkait dengan implementasi kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan ataupun pengelolaan wisata sama halnya dengan penelitian Reny Triwardani dan Christina Rochayanti (2014) yang mana kebijakan tersebut juga menganalisis mengenai implementasi kebijakan desa wisata dimana pengembangan pada desa wisata tersebut lebih kepada SDM, kelembagaan serta prasaranan. Dalam pelaksanaannya setiap kebijakan pastinya harus diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku. Penerapan kebijakan tersebut harus ditekankan dengan berbagai faktor agar implementasi tersebut berjalan seperti halnya dalam penelitian Neshafi Laudza Rahmadian (2021) dimana implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung diterapkan secara eksplisit, yakni tegas dalam pelaksanaan dan transparan dalam pelayanan pada Desa Wisata Tlahab. agar mengalami perkembangan dalam administrasi maupun operasional. Namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dalam penerapan kebijakan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo yakni peran aktif masyarakat, aparatur yang kurang memahami teknologi, sedikitnya investor serta adanya pandemi Covid-19. Seperti halnya dalam penelitian Sri Nurhayati Qodriyatun (2018) dimana kendala pada implementasi kebijakan pengembangan wisata berkelanjutan di Karimun Jawa yakni pengembangan wisata tersebut menyebabkan pada permasalahan sampah, air bersih, kerusakan terumbu karang, dan perubahan sosial budaya masyarakat. Seharusnya pengembangan wisata itu sendiri harus memiliki nilai positif yang berdampak bagi kemajuan pariwisata tersebut. Kendala yang ada merupakan faktor penghambat disamping itu terdapat pula faktor pendukung dalam pengembangan Desa Wisata Pandanrejo antara lain DINPORAPAR untuk meningkatkan pengembangan Desa Wisata tersebut. Sama halnya dalam penelitian Soleman Yelo Bora (2018) dimana faktor yang mempengaruhi tersebut terdapat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang merupakan indikator utama pengembangan wisata bunga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Desa Sidomulyo Kota Batu yang juga sebagai faktor pendukung disamping indikator dalam pengukuran pengembangan tersebut. Harapannya dengan kebijakan pengembangan Desa Wisata di Pandanrejo ini beserta pengembangan wisata lainnya dapat menjadikan pola keteraturan dalam melaksanakan pengembangan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain itu didalamnya juga mengatur mengenai seluruh hal terkait peran yang dapat membantu pengembangan desa wisata baik dari pemerintah, aparatur, maupun masyarakat seperti dalam penelitian Desa Putu Dewi Ryani dan Gede Sandisa (2017) serta peranan dari berbagai faktor lainnya sehingga dampaknya akan memberikan kemajuan terhadap pariwisata terkhusus desa wisata ini.

IV. KESIMPULAN

Penulis implementasi kebijakan Pengembangan Desa Wisata Pandanrejo berdasarkan teori Edward III dirasa baik namun masih perlu peningkatan. Namun masih terdapat kendala seperti peran aktif dari masyarakat dalam dalam pengembangan Desa Wisata Pandanrejo meskipun mereka memahami potensi wisata yang ada di Desa Pandanrejo. Selain itu tingkat kepehaman teknologi dari operator, sedikitnya jumlah investor. Kemudian pandemi *Covid 19*. Hal tersebut menghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa wisata Pandanrejo di Kabupaten Purworejo. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Purworejo adalah komitmen dari pimpinan daerah seperti Bupati, DPRD, serta dinas terkait. Adanya kesadaran dari masyarakat terkait potensi wisata desa. Kemudian Dukungan dalam hal pengembangan dari Badan Otoritas Borobudur serta proyek Strategis Nasional Bendung Bener. Upaya mengatasi faktor penghambat Implementasi kebijakan Desa wisata di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, adalah Berupaya menarik investor. Berkoordinasi dengan pihak desa wisata yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan fasilitas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Pandanrejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Camat Kaligesing, dan Kepala Desa Pandanrejo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Dyah dan Arif. 2014. "Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan" dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (Eds.) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erliana Hasan. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gelgel, Putu. 2006. *Industri Pariwisata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Liauw, G. 2015. *Administrasi pembangunan: studi kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nasution, Syamruddin. 2014. *Metode Reserch*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nurdin, Ismail. 2019. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sedarmayati. 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gaya Media.

Syafri, Wirman dan P. Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqa Prisma Interpelita.

Utama, I Gusti Bagus Rai. 2017. *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yoeti, Oka. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Paradnya Paramita

Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo

Atmoko, T. P. H. 2018. “*Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Melestarikan Budaya Lokal di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman*”. *Media Wisata*, 16(1).

Bora, S. Y. (2019). “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”t. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3).

Qodriyatun, S. N. 2019. “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*’, 9(2), 240-259.

Rahmadian, N. L. 2021. “*Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Pada Pengembangan Desa Wisata Tlahab*”. *Lontar Merah*, 4(1), 316-327.

Ryani, D. P. D., & Sandiasa, G. 2017. “*Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Air Sanih*”. *Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 7, 1-13.

Triwardani, R., & Rochayanti, C. 2014. “*Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal*”. *Reformasi*, 4(2).

<https://purworejokab.bps.go.id/publikasi.html>. Rabu, 25 Agustus 2021

<https://www.radarpurworejo.id/news/2021/03/16/pariwisata-harus-tetap-berjalan/?amp>. Rabu, 25 Agustus 2021